

FENOMENA DIPLOMASI PUBLIK DI ERA *POST-TRUTH*: DARI KESEPAHAMAN BERSAMA MENUJU MANIPULASI PESAN PROPAGANDA

THE PHENOMENON OF PUBLIC DIPLOMACY IN THE POST-TRUTH ERA: FROM MUTUAL UNDERSTANDING TO THE MANIPULATION OF PROPAGANDISTIC MESSAGES

Riski M Baskoro¹, Fitri Sarasati², Tri Wahyuti³, Herman Paninggiran⁴, Prasetya Yoga Santoso⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sahid Jakarta

Sahid Sudirman Residence, Lt. 5, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: riskibaskoro@president.ac.id

ABSTRACT

This study examines the transformation of public diplomacy in the post-truth era through Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis (CDA) framework. In a global context where meaning is increasingly manipulated, public diplomacy has shifted from an ethical exchange toward an ideological instrument that frames truth through moral language. The research aims to reveal how public diplomacy discourse reproduces power and normalizes domination across Van Dijk's three levels of analysis: macrostructure, superstructure, and microstructure. Using a qualitative method, the study analyzes diplomatic speeches, official documents, and international media texts. The findings indicate that, at the macro level, public diplomacy promotes universal values such as peace and cooperation to build moral legitimacy; at the superstructural level, narratives are organized to reinforce ethical credibility; and at the micro level, linguistic choices and rhetorical strategies conceal ideological interests. The study concludes that public diplomacy in the post-truth era operates as an ideological discourse that uses language to shape global perception and public consciousness.

Keywords: public diplomacy, critical discourse analysis, Teun A. van Dijk, post-truth, ideology, global communication

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi diplomasi publik di era *post-truth* menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk. Dalam konteks global yang sarat manipulasi makna, diplomasi publik tidak lagi berfungsi semata sebagai komunikasi etis, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang membingkai kebenaran melalui bahasa moral. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap bagaimana struktur wacana diplomasi publik mereproduksi kekuasaan dan menormalisasi dominasi melalui tiga lapisan analisis Van Dijk: makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis teks dari pidato, dokumen diplomasi, dan pemberitaan media internasional. Hasil menunjukkan bahwa pada tingkat makrostruktur, diplomasi publik menonjolkan nilai universal seperti perdamaian dan kerja sama untuk legitimasi moral; pada superstruktur, narasi disusun untuk meneguhkan citra etis; dan pada mikrostruktur, pilihan diksi dan bentuk kalimat menampilkan strategi retorik yang menutupi kepentingan ideologis. Kesimpulannya, diplomasi publik di era *post-truth* merupakan praktik wacana ideologis yang bekerja melalui bahasa untuk membentuk persepsi dan kesadaran publik global.

Kata kunci: diplomasi publik, analisis wacana kritis, Teun A. van Dijk, *post-truth*, ideologi, komunikasi global

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara sederhana, menurut Alberts, Nakayama dan Martin (2010: 6) komunikasi adalah suatu proses di mana individu atau lebih dapat membentuk makna melalui pertukaran pesan baik verbal maupun non-verbal. Sedangkan dalam diplomasi publik dapat dipahami juga

sebagai proses komunikasi di mana aktor negara dan juga aktor non-negara membangun makna secara bersama-sama dalam menjalin hubungan antar negara dan bangsa melalui pertukaran pesan baik secara verbal dan non-verbal. Artinya, diplomasi publik merupakan bagian dari komunikasi yang lebih luas dan tulisan ini terfokus untuk menelaah lebih lanjut perkembangan diplomasi publik dari kelahiran praktiknya sampai dengan era *post-Truth*.

Diplomasi publik sejatinya terlahir dengan adanya perang pemikiran di masa perang dunia dan berlanjut hingga perang dingin dimulai dari era Woodrow Wilson dan Lenin yang berkompetisi dalam berebut pengaruh ideologis lintas negara semenjak tahun 1917. Amerika Serikat begitu sadar bahwa mempengaruhi opini publik sama pentingnya dengan pergerakan militer (Melissen, 2005:3). Kemudian, praktik-praktik diplomasi publik ini di bawa oleh Edmund Gullion pada tahun 1965 untuk dipelajari secara lebih akademik untuk pertama kalinya di Tufts University, Amerika Serikat (Altman dan Shore, 2014).

Awal kelahiran studi diplomasi publik rupanya merujuk pada nilai-nilai dan esensi dari diplomasi publik itu sendiri, di mana para intelektual di awal popularitasnya teori ini meyakini bahwa bentuk dari diplomasi publik itu berbeda dengan propaganda, bahkan secara jelas Amerika Serikat ingin memberikan perbedaan yang lugas bahwa diplomasi publik adalah penyebaran ideologi demokrasi Amerika melalui suatu rangkaian proses komunikasi yang etis, dengan tujuan membangun perdamaian dunia. Sekali lagi, Amerika Serikat mendekonstruksi program propaganda Soviet yang pada saat itu banyak diklaim penuh dengan kebohongan, disinformasi, mengalpakkan etika dan memiliki sifat yang totaliter.

Hal ini tentu sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menjelaskan bahwa diplomasi publik pada awalnya memang difungsikan untuk menyebarkan paham dan ideologi versi Amerika Serikat atau dengan versi Barat, bahkan dalam difusi informasinya pemerintah Amerika pada saat itu memformasi suatu lembaga bernama *United States Information Agency* (USIA) pada masa perang dingin di tahun 1953. Lembaga ini diformasikan dengan intensi untuk menentang ideologi Komunis Soviet yang melulu diklaim penuh kebohongan di pihak Barat. Hal yang perlu diperhatikan adalah USIA menyebarkan budaya barat khas Amerika Serikat serta ideologinya ke publik mancanegara melalui pertukaran budaya ataupun siaran berita elektronik dan bahkan mengirimkan *Jazz Ambassador* sebagai medium atau instrumen diplomasi ke berbagai penjuru negara (Schneider: 2004).

Ketika Edmund Gullion membawa studi diplomasi publik ke lingkungan universitas, studi tentang diplomasi publik kian berkembang dan memberikan banyak sekali definisi terkait

dengan kegiatan maupun program yang terafiliasi dengan diplomasi yang fokus pada publik mancanegara (Altman dan Shore, 2014). Hingga awal berdirinya studi diplomasi publik dominasi pemerintah atau negara masih sangat kental secara teoretis dan praktis, namun belakangan Snow dan Cull (2020) dan Melissen (2004: hal.12) menyebut bahwa aktor non-pemerintah belakangan juga turut andil di dalam praktiknya dan bahkan berkontribusi secara langsung menuju dialog yang lebih interaktif dan membangun *mutual engagement*. Pemikiran Melissen serta Snow dan Cull tentu memberikan ilustrasi yang berbeda dari pandangan awal Gullion yang tidak begitu memperhatikan fungsi aktor non-pemerintah. Gagasan Melissen serta Snow dan Cull dianggap sebagai transisi diplomasi publik yang awalnya hanya fokus pada arena negara menuju ruang yang lebih inklusif dalam membangun dialog interaktif dengan aktor non-negara.

Diplomasi publik merupakan bentuk komunikasi politik global yang berfungsi membangun citra, kepercayaan, dan legitimasi suatu negara di hadapan publik internasional. Secara normatif, diplomasi publik dipahami sebagai praktik komunikasi dua arah yang mengutamakan transparansi, dialog, serta nilai etika universal. Melissen (2005) dan Snow & Cull (2020) menekankan diplomasi publik sebagai upaya negara menjalin hubungan jangka panjang melalui pertukaran budaya, informasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, diplomasi publik sering kali bergerak dalam ruang yang sarat kepentingan politik dan ekonomi global. Ia tidak semata-mata menjadi sarana komunikasi etis, tetapi juga instrumen kekuasaan yang digunakan untuk membentuk persepsi dan kesadaran publik internasional.

Selanjutnya, diplomasi publik memasuki abad-21 yang notabene terdampak pada era baru berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pada akhirnya merubah fungsi diplomasi publik untuk lebih terbuka, partisipatif dan berbasis *soft power* dalam membina hubungan positif berjangka panjang. Dari penjabaran yang ada, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa diplomasi publik secara teoretis telah mengubah atau dapat dikatakan mengalihfungsikan dari model lama dengan karakteristik model komunikasi satu arah, fokus hanya pada difusi informasi, aktor dominan adalah pemerintah dan fokus hanya pada efek komunikasi bertransformasi menuju model yang mutakhir di mana diplomasi publik era modern menekankan pada komunikasi dua arah (membangun deliberasi), menyebarkan informasi untuk membangun hubungan baik dan kepercayaan (*trust*), serta aktor yang bermain dalam panggung hubungan interaksi internasional dan komunikasi tidak hanya pemerintah tapi juga non-pemerintah dengan fokus kepada efek komunikasi yang lebih cenderung berjangka panjang.

Kehadiran era *post-truth* memperkuat pergeseran fungsi diplomasi publik tersebut. Ketika fakta tidak lagi menjadi dasar utama dalam membentuk opini, dan emosi menjadi sumber legitimasi, diplomasi publik berubah menjadi arena produksi makna di mana kebenaran dikonstruksi secara strategis. Dalam konteks ini, diplomasi publik memanfaatkan bahasa moral, simbol kemanusiaan, dan narasi etika untuk menciptakan citra positif yang dapat menutupi kepentingan politik tertentu. Kebenaran menjadi relatif, dan makna yang disebarluaskan melalui media internasional lebih mencerminkan siapa yang memiliki kekuasaan atas narasi daripada siapa yang memiliki bukti.

Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa dalam diplomasi publik berfungsi bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai instrumen ideologis. Melalui pilihan diksi, struktur narasi, dan strategi retorik, diplomasi publik mereproduksi bentuk kekuasaan yang bersifat simbolik. Dalam kerangka *Analisis Wacana Kritis* (AWK) Teun A. van Dijk (1993, 2008), wacana selalu berkaitan erat dengan kekuasaan dan ideologi. Aktor yang memiliki kontrol atas produksi wacana memiliki kemampuan untuk membentuk kesadaran dan mengarahkan makna sosial sesuai kepentingannya. Oleh karena itu, diplomasi publik di era *post-truth* perlu dibaca sebagai praktik wacana ideologis yang menyembunyikan relasi kuasa di balik bahasa moralitas global.

Melalui pendekatan Van Dijk, diplomasi publik dapat dianalisis secara lebih mendalam untuk menyingkap bagaimana struktur teks (makro, super, dan mikro) bekerja membangun legitimasi moral sekaligus menormalisasi dominasi. Bahasa etika seperti “perdamaian”, “kepercayaan”, dan “kerja sama” digunakan untuk mengkonstruksi citra universal yang tampak positif, padahal sering kali berfungsi untuk meneguhkan posisi negara dominan dalam tatanan global. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa diplomasi publik di era *post-truth* bukan sekadar strategi komunikasi antarnegara, tetapi juga praktik ideologis yang memanfaatkan kekuatan wacana untuk mengendalikan persepsi publik dunia.

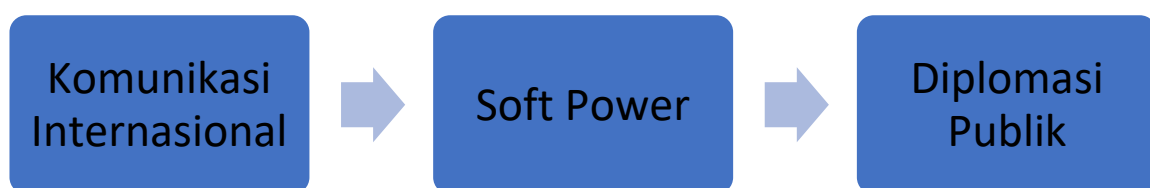
1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, muncul persoalan mendasar mengenai bagaimana diplomasi publik di era *post-truth* membentuk wacana, memproduksi makna, dan menanamkan ideologi melalui bahasa. Secara umum, masalah penelitian ini terletak pada kontradiksi antara citra diplomasi publik sebagai praktik komunikasi etis dan kenyataan bahwa ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol simbolik dalam struktur kekuasaan global.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana struktur wacana diplomasi publik di era *post-truth* membingkai ideologi dan kepentingan politik di balik narasi moralitas global? Kedua, bagaimana strategi retorik, pemilihan diksi, dan pola penyusunan teks digunakan untuk menormalisasi relasi kekuasaan serta membangun legitimasi moral? Ketiga, bagaimana konteks sosial dan produksi wacana diplomasi publik mencerminkan praktik dominasi simbolik sebagaimana dijelaskan oleh Van Dijk melalui konsep hubungan antara wacana dan kekuasaan?

1.3. KERANGKA TEORI

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini tentunya adalah diplomasi publik yang berfungsi sebagai pusat diskusi dari penelitian ini. Namun demikian, sangat mustahil rasanya jika tidak mengenal lebih jauh teori lain yang relevan dengan diplomasi publik itu sendiri, oleh sebab itu ada juga teori yang mendukung seperti *soft power*, *nation brand* dan diplomasi budaya. Pada tatanan teori, dalam komunikasi internasional dikenal dua pendekatan yang populer, yakni *soft power* dan *hard power*. Dalam kajian *soft power* (kekuatan lunak) dapat dijelaskan bahwa ini merupakan kemampuan untuk menarik dan menarik hati pihak lain melalui budaya, nilai-nilai dan kebijakan luar negeri tanpa adanya paksaan, berbeda dengan pendekatan *hard power* yang memiliki unsur dan sifat memaksa untuk mencapai tujuan komunikasinya (Nye, 2004). Dapat dikatakan, *soft power* adalah sumbernya sedangkan instrumen atau alat transmisi pesan dapat berupa diplomasi publik, diplomasi budaya ataupun *nation branding*.



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Menurut Edmund Gullion di masa awal-awal berdirinya teori diplomasi publik dapat diartikan sebagai *the influence of public attitudes on the formation and execution of foreign policies encompass(ing) dimensions of international relations beyond traditional diplomacy* (Altman dan Shore, 2014). Di pihak lain diplomasi publik dapat diartikan sebagai *beyond government to foreign publics communication, it is about building relationships* (Melissen, 2005). Atau definisi yang lebih detail dan lebih modern adalah *public diplomacy philosophies, strategies and tactics have fully shifted from one-way informational diplomatic objectives to*

two way interactive and networked public dimensions; exchange and reciprocity are becoming trust-building measures, and we are adding a personal and social dimension to other variables of influence and persuasion (Snow dan Taylor, 2024).

Sederhananya, secara teoretis para cendekia studi diplomasi telah merumuskan bahwa diplomasi publik merupakan interaksi dua arah, pertukaran ide dan saling membangun kepercayaan antar negara bangsa. Kemudian, teori lain yang digunakan adalah propaganda yang disebut oleh Mark (2010) memiliki sifat manipulatif, satu arah (tanpa memberikan ruang dialog), tidak etis (karena diisi dengan informasi palsu dan manipulatif) dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam propaganda model yang diperkenalkan oleh Chomsky dan Herman (1988), media atau produsen pesan itu tidaklah netral, mereka mampu menyaring informasi melalui lima filter yang diantaranya adalah (1) kepemilikan media, biasanya dimiliki oleh para elite dan tentunya berpihak pada kepentingan korporasi ataupun penguasa negara (2) pendana iklan, ketergantungannya pada sponsor akan membatasi isi pemberitaan dan bahkan melimitasi suatu informasi (3) sumber informasi, tentu akan dependensi terhadap pemerintah dan korporasi sebagai sumber utama (4) kritik dan ideologi yang dominan. Kontras dengan gagasan Mark (2010) bahwa diplomasi publik yang etis itu berakar dari *audience engagement*, *mutual understanding* dan ketepatan informasi.

Selain itu teori yang akan mendukung untuk menjawab rumusan masalah adalah *agenda setting*. Menurut pemikiran Nurudin (2007) *agenda setting* memiliki fokus bahwa media akan mempengaruhi isu yang dianggapnya penting. Selanjutnya, menurut Sitanggang (2005), *framing* mengacu pada bagaimana media menyajikan suatu isu atau peristiwa dengan sudut pandang tertentu, pemilihan kata, visual dan narasi yang dapat membentuk suatu cara pandang dan persepsi publik tentang suatu isu tertentu. Dalam konteks diplomasi publik, pemerintah atau aktor diplomatik lainnya menggunakan media untuk memprioritaskan isu-isu tertentu agar menjadi perhatian utama audiens internasional atau domestik.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membongkar secara kritis teori dan praktik diplomasi publik yang telah bergeser ke arah propaganda di era *Post-Truth*. Tulisan ini juga bertujuan untuk menelaah bahwa teori diplomasi publik yang ada perlu direvitalisasi, karena tidak lagi sesuai dengan esensi dan semangat diplomasi publik itu sendiri di masa awal kelahirannya. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh bagaimana saat

ini produsen diplomasi publik (pemerintah) hanya berfokus untuk mengejar cita-cita atau intensi dari kepentingan nasionalnya dan secara halus menutup ruang dialog antar negara bangsa, padahal secara teori dan awal munculnya diplomasi publik sangatlah jauh dari klaim propaganda.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan nuansa analisis wacana kritis, dengan memberikan beberapa contoh praktik diplomasi atau komunikasi antarnegara sebagai argumentasi gagasan dari para penulis untuk membongkar sekaligus menganalisis bagaimana diplomasi publik pada era *post-Truth* telah bertransformasi menjadi alat persuasi dan kontrol narasi yang memiliki kecenderungan menuju ke arah propaganda. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, representasi (melalui beberapa contoh kasus) serta memunculkan pemikiran kritis pada praktik komunikasi negara dalam konteks diplomasi publik yang memasuki era *post-Truth*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagaimana dikembangkan oleh (van Dijk, 2008). Pendekatan ini dipilih karena secara epistemologis mampu menjelaskan hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan yang bekerja di dalam teks dan praktik komunikasi diplomasi publik. Dalam pandangan Van Dijk, wacana bukanlah sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan bentuk tindakan sosial yang mencerminkan struktur pengetahuan, ideologi, dan kepentingan kekuasaan tertentu. Bahasa digunakan oleh aktor dominan untuk mengatur akses terhadap informasi, memproduksi makna, dan mengarahkan opini publik. Dengan demikian, analisis wacana kritis dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menyingkap dimensi tersembunyi di balik narasi diplomasi publik yang tampak etis, dialogis, dan moral, tetapi sejatinya beroperasi sebagai mekanisme ideologis dan hegemonik.

Penelitian ini bersifat deskriptif-interpretatif, karena berupaya memahami makna yang tersembunyi di balik teks diplomasi publik, bukan sekadar mengukur frekuensi atau struktur formalnya. Fokus utamanya terletak pada bagaimana praktik diplomasi publik di era *post-truth* direpresentasikan melalui wacana yang mengandung unsur manipulasi makna, pembungkai kebenaran, serta kontrol terhadap kesadaran publik global. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melihat diplomasi publik sebagai arena produksi ideologi yang bekerja melalui bahasa moralitas, simbol universal, dan citra etis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dan telaah teks. Data primer mencakup dokumen resmi diplomasi publik seperti pidato, pernyataan, dan laporan dari lembaga diplomasi dan kementerian luar negeri, misalnya *United States Department of State*, *European External Action Service (EEAS)*, dan *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Data ini mencerminkan praktik diplomasi publik negara-negara besar dan menengah yang aktif membangun citra moral di ruang global. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel media internasional seperti *BBC*, *Al-Jazeera*, dan *The Guardian*, serta jurnal dan literatur akademik yang membahas diplomasi publik, propaganda, soft power, dan fenomena *post-truth* (Melissen, 2005; Snow & Cull, 2020; Chomsky & Herman, 1988; Izadi & Nelson, 2020).

Pemilihan data dilakukan secara purposive sampling, yakni dengan memilih teks yang secara eksplisit menampilkan praktik komunikasi diplomasi publik dalam konteks persuasi moral, manipulasi kebenaran, atau hegemoni wacana. Proses analisis dilakukan dengan mengikuti tiga lapisan utama sebagaimana dikemukakan Van Dijk. Pertama, analisis makrostruktur, yaitu mengidentifikasi tema utama, nilai, dan ideologi yang dominan dalam wacana diplomasi publik, misalnya konsep “etika”, “perdamaian”, “kepercayaan”, dan “soft power”. Lapisan ini berfungsi untuk melihat makna global yang menstrukturkan seluruh teks. Kedua, analisis superstruktur, yaitu menelaah pola penyusunan pesan, urutan argumentatif, serta bentuk retorika yang digunakan untuk meneguhkan legitimasi moral suatu kebijakan diplomatik. Lapisan ini mengungkap bagaimana narasi dibuka dengan ajakan moral dan ditutup dengan pembenaran politik, menciptakan pola wacana yang menormalisasi kekuasaan. Ketiga, analisis mikrostruktur, yaitu pemeriksaan terhadap unsur linguistik dan retorik seperti diksi, pronomina (“kami” vs “mereka”), metafora, intensifikasi, dan penggunaan kalimat pasif. Melalui lapisan ini terlihat bagaimana pilihan bahasa berfungsi sebagai strategi ideologis untuk membangun citra positif pengirim pesan, menutupi kepentingan politik, serta mengaburkan peran agen dominan dalam produksi makna.

Seluruh temuan dari ketiga lapisan tersebut kemudian dikaitkan dengan analisis konteks sosial, yang menelaah bagaimana wacana diplomasi publik diproduksi, disebarkan, dan diterima dalam sistem komunikasi global. Aspek yang diperhatikan meliputi siapa aktor yang memiliki otoritas atas produksi wacana (negara, lembaga, media, atau korporasi), bagaimana akses terhadap informasi dikelola, serta bagaimana media digital memperkuat hegemoni melalui mekanisme viralitas dan algoritma. Dengan mengaitkan struktur teks dan konteks

sosialnya, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana diplomasi publik berfungsi sebagai wacana hegemonik yang mereproduksi kepentingan politik di bawah kedok nilai etika dan kemanusiaan.

Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber dan teori (Creswell & Poth, 2018). Artinya, setiap hasil analisis teks dibandingkan dengan data dari media dan literatur akademik untuk memastikan konsistensi makna serta kesesuaian konteks sosialnya. Proses analisis dilakukan secara iteratif—membaca, mengkode, menafsir, dan memverifikasi secara berulang—hingga diperoleh pola ideologis yang stabil dan konsisten di seluruh data. Keabsahan juga dijaga melalui keterlacakan interpretasi (*audit trail*), di mana setiap langkah analisis dapat dikonfirmasi berdasarkan bukti tekstual.

Dengan pendekatan ini, metode penelitian tidak hanya berfungsi untuk menguraikan isi wacana diplomasi publik, tetapi juga untuk membongkar relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di dalamnya. Melalui AWK Van Dijk, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa diplomasi publik di era *post-truth* adalah wacana yang beroperasi di antara moralitas dan kekuasaan: ia mengklaim berbicara atas nama etika dan perdamaian, tetapi dalam struktur bahasanya mengandung praktik kontrol makna dan pembentukan kesadaran publik yang hegemonik. Dengan demikian, metode ini memberikan dasar analitis yang kuat untuk mengungkap transformasi diplomasi publik dari komunikasi etis menuju bentuk propaganda simbolik yang bekerja melalui bahasa dan representasi ideologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Padli dan Mustofa (2021), era *post-Truth* muncul karena adanya pelemahan rasionalitas *audience* atau publik dalam menilai suatu informasi. Purba dan Sitorus (2023) meyakini bahwa *post-Truth* adalah suatu situasi di mana keyakinan pribadi dan emosi memiliki pengaruh yang dominan dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta ataupun realitas sosial yang sebenarnya. Dalam ruang *post-Truth* fakta tidak lagi menjadi rujukan utama kebenaran dan lebih menekankan pada persepsi, viralitas dan framing yang mengikat emosional publik, yang pada akhirnya diklaim sebagai basis kebenaran.

Rupanya era *post-Truth* tidak hanya mengguncang basis epistemologi yang ada di publik namun juga telah mendekonstruksi integritas dari praktik diplomasi publik modern. Senada dengan pemikiran Purba dan Sitorus (2023); Kaukab dan Hidayah (2020) yang menyebut bahwa era *post-Truth* ditandai dengan banjirnya informasi, hoaks dan narasi yang memicu

emosi publik, selain itu diskursus global dimanipulasi oleh aktor-aktor negara dan non-negara. Diplomasi publik yang kini hidup di arena *post-Truth*, yang seharusnya menjadi sarana membangun hubungan yang baik, saling kesepahaman, rasa saling percaya dan kebenaran kini mirip dengan propaganda yang berbalut dengan paket kebijakan yang seolah-olah bermoral, namun sebenarnya tidak sesuai dengan realitas sosial.

Izadi dan Nelson (2020), menyebutkan dalam banyak hal, negara melalui pemerintah telah melakukan seleksi atas fakta dan *framing* emosional yang dibalut dalam paket kebijakan luar negeri atau yang dikenal dengan istilah diplomasi publik. Karakteristik semacam itu sebetulnya sudah hadir dalam pemahaman era *post-Truth*, banyak praktik-praktik diplomasi publik mengacu pada efisiensi persuasi tanpa memiliki komitmen terhadap realitas objektif dan bahkan dalam diplomasi itu sendiri objektifnya secara definitif adalah mengacu untuk memenuhi kepentingan nasional dan seringnya mengalahkan kejujuran penuh dalam berkomunikasi dengan publik internasional.

Sederhananya, dalam konsepsi diplomasi publik, sudah dieksplorasi dengan seksama pada bagian kerangka teori bahwa diplomasi publik itu mengacu pada komunikasi dua arah, membuka ruang dialog dan mengedepankan kebenaran moralitas serta etika. Namun demikian, ketika diplomasi publik memasuki era *post-Truth* maka yang terjadi adalah pergeseran makna dari diplomasi publik yang awalnya adalah mengedepankan dialog dan berkomunikasi dua arah serta mengedepankan *truth*, menjadi fakta itu tidak lagi menjadi panduan dan rujukan, serta menciptakan lalu-lintas disinformasi berita. Hasilnya adalah diplomasi publik menjadi arena permainan propaganda karena sifatnya yang manipulatif dan tidak merujuk pada kebenaran.



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Hasil analisis wacana terhadap teks-teks diplomasi publik yang dikumpulkan dari dokumen resmi lembaga diplomasi internasional, pidato pejabat negara, dan laporan media menunjukkan bahwa diplomasi publik di era *post-truth* tidak lagi berfungsi sebagai komunikasi etis dan deliberatif sebagaimana cita-cita awalnya, melainkan telah bergeser menjadi arena produksi

wacana hegemonik yang menutupi relasi kuasa di balik bahasa moralitas. Dengan menggunakan kerangka *Analisis Wacana Kritis* (AWK) Teun A. van Dijk, penelitian ini menemukan bahwa struktur wacana diplomasi publik dibangun melalui tiga dimensi utama—makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur—yang saling memperkuat dalam membentuk makna ideologis yang mendukung kepentingan politik aktor dominan.

Pada tataran **makrostruktur**, diplomasi publik secara konsisten menampilkan tema-tema besar seperti *perdamaian, kepercayaan, kolaborasi global, kemanusiaan, dan etika internasional*. Tema-tema ini membentuk *topik global* yang tampak positif dan universal, seolah-olah seluruh praktik diplomasi publik didasari oleh niat baik untuk membangun keharmonisan antarbangsa. Namun, di balik tema tersebut tersimpan ideologi yang bekerja secara halus: narasi perdamaian digunakan untuk membenarkan intervensi politik; konsep etika digunakan untuk melegitimasi tindakan sepihak; dan gagasan kerja sama internasional menjadi instrumen untuk memperluas pengaruh budaya atau ekonomi. Dalam terminologi Van Dijk, makrostruktur berfungsi untuk menanamkan “kerangka ideologis” yang menutupi kepentingan hegemonik melalui pembingkai nilai moral. Dengan demikian, diplomasi publik menampilkan citra etis di permukaan, tetapi secara epistemologis mereproduksi ketimpangan relasi antara negara dominan dan negara yang menjadi objek diplomasi.

Analisis terhadap **superstruktur**, atau pola organisasi dan retorika teks, memperlihatkan bahwa diplomasi publik disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dan persuasif. Umumnya, teks diplomasi publik dimulai dengan bagian pembuka yang penuh dengan pernyataan moral, seperti pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan dialog lintas budaya. Bagian tengah teks menampilkan argumentasi rasional yang membingkai kebijakan luar negeri sebagai bentuk tanggung jawab global, sementara bagian penutup selalu diakhiri dengan ajakan untuk bersatu, berkolaborasi, dan mempercayai niat baik negara pengirim pesan. Pola naratif seperti ini berfungsi sebagai *struktur legitimasi moral*—membangun kredibilitas pada awal wacana, kemudian menanamkan pembenaran ideologis di akhir. Dalam analisis Van Dijk, superstruktur semacam ini menunjukkan bentuk kontrol kognitif, karena pembaca diarahkan untuk menerima pesan politik melalui rangkaian argumen moral yang tampak objektif. Pola ini juga memperlihatkan bagaimana diplomasi publik mengatur urutan makna untuk menghasilkan efek persuasi yang kuat tanpa menggunakan bahasa koersif.

Dalam **mikrostruktur**, atau dimensi kebahasaan yang lebih halus, ditemukan berbagai strategi linguistik dan retorik yang memperkuat citra moral diplomasi publik sekaligus

mengaburkan struktur kekuasaan yang melandasinya. Pertama, penggunaan diksi yang berkonotasi positif seperti *dialogue*, *mutual understanding*, *shared values*, *solidarity*, *trust*, dan *peaceful cooperation* menjadi penanda kuat dari upaya pembentukan citra etis. Namun di sisi lain, muncul pula istilah seperti *strategic communication*, *influence*, *narrative building*, dan *counter-disinformation* yang mengindikasikan orientasi kekuasaan dan kontrol makna. Kedua, struktur kalimat pasif sering digunakan untuk menghindari penunjukan subjek pelaku, misalnya dalam pernyataan seperti “errors were made” atau “messages were shaped to ensure clarity”, yang secara implisit menghapus tanggung jawab aktor pengirim pesan. Ketiga, penggunaan pronomina personal seperti “kami” dan “mereka” memperkuat oposisi moral—“kami” diasosiasikan dengan nilai luhur dan perdamaian, sementara “mereka” digambarkan sebagai penyebar hoaks, ancaman stabilitas, atau pelanggar etika komunikasi internasional. Pola ini sesuai dengan apa yang disebut Van Dijk sebagai *ideological square*, yaitu strategi yang menonjolkan kebaikan diri dan menutupi keburukan, sekaligus menonjolkan keburukan pihak lain dan menutupi kebajikannya. Melalui pola semacam ini, wacana diplomasi publik bekerja tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui struktur oposisi yang menanamkan hierarki moral antara pengirim dan penerima pesan.

Selain itu, aspek gaya bahasa juga memperlihatkan adanya praktik *eufemisme politik*, di mana tindakan manipulatif dibungkus dengan istilah yang lembut dan positif. Misalnya, kegiatan *information management* digunakan untuk menggantikan istilah *propaganda*; *strategic messaging* digunakan alih-alih *public persuasion*; dan *stabilization efforts* menggantikan istilah *intervention*. Eufemisme ini berfungsi untuk meminimalkan persepsi negatif terhadap tindakan politik dan mengubahnya menjadi tindakan moral yang seolah-olah dilakukan demi kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bagaimana pilihan kata secara mikro dapat menggeser pemaknaan publik terhadap suatu tindakan yang sebenarnya bersifat hegemonik.

Ketika hasil analisis bahasa dikaitkan dengan konteks sosial dan produksi wacana, terlihat bahwa diplomasi publik merupakan bentuk komunikasi yang dikendalikan oleh institusi dengan akses besar terhadap media dan teknologi informasi. Negara, lembaga internasional, dan korporasi digital memiliki posisi dominan dalam menentukan apa yang disebut “benar”, “etis”, dan “dapat dipercaya”. Dalam konteks *post-truth*, kekuasaan tidak lagi beroperasi melalui kontrol fisik, melainkan melalui penguasaan terhadap ruang diskursif. Kebenaran menjadi hasil negosiasi simbolik, bukan realitas objektif. Narasi diplomasi publik yang dikemas dengan nilai-nilai moral berfungsi untuk menstabilkan legitimasi politik dalam lanskap informasi yang penuh

distorsi. Fenomena ini menguatkan pandangan Van Dijk bahwa kontrol terhadap wacana berarti juga kontrol terhadap kesadaran publik (*control of mental models*). Aktor yang memiliki akses terhadap produksi makna dapat menentukan persepsi publik tentang realitas global—siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang beradab, dan siapa yang perlu diarahkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi publik di era *post-truth* beroperasi sebagai wacana kekuasaan yang berkamufase dalam moralitas komunikasi. Secara makro, tema dan nilai universal digunakan untuk menciptakan kesan keadilan dan kemanusiaan; secara superstruktural, narasi dan alur argumentatif disusun untuk menanamkan legitimasi politik; dan secara mikro, bahasa dan diksi dipilih untuk menutupi struktur dominasi di baliknya. Dalam keseluruhan konteks sosialnya, diplomasi publik merupakan praktik representasi ideologis di mana kekuasaan simbolik bekerja melalui bahasa, bukan kekuatan militer atau ekonomi secara langsung.

Hasil ini sekaligus memperlihatkan bagaimana era *post-truth* telah mengubah diplomasi publik menjadi medan ideologis yang mengaburkan batas antara komunikasi etis dan propaganda. Ketika kebenaran menjadi relatif dan bahasa menjadi instrumen kekuasaan, diplomasi publik tidak lagi sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan realitas yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa. Dalam konteks inilah, analisis wacana kritis Van Dijk menjadi relevan, karena memungkinkan pembacaan yang lebih dalam terhadap struktur makna, strategi retorik, dan relasi ideologis yang tersembunyi di balik wajah etis diplomasi publik modern.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan pada bagian pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa diplomasi publik di era *post-truth* bukan lagi praktik komunikasi etis antarnegara, melainkan telah bertransformasi menjadi wacana ideologis yang memanipulasi moralitas untuk mempertahankan kekuasaan. Struktur wacananya dibangun untuk menampilkan etika universal di permukaan, namun di dalamnya terkandung logika dominasi yang menormalisasi ketimpangan global. Bahasa dalam diplomasi publik bukan sekadar alat komunikasi, melainkan mekanisme politik untuk membingkai kebenaran dan mengatur kesadaran publik. Dengan demikian, diplomasi publik merupakan bentuk kekuasaan simbolik yang bekerja melalui narasi, bukan paksaan.

Secara **teoretis**, penelitian ini memperluas pemahaman tentang diplomasi publik dalam perspektif kritis dengan menempatkannya sebagai praktik produksi makna yang sarat ideologi.

Pendekatan Van Dijk terbukti efektif untuk membedah struktur wacana, pola retorik, dan hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam komunikasi global. Temuan ini mengonfirmasi bahwa analisis wacana kritis mampu mengungkap relasi tersembunyi antara moralitas dan dominasi dalam teks diplomasi publik.

Secara **praktis**, penelitian ini memberikan kesadaran bagi praktisi komunikasi dan pembuat kebijakan luar negeri agar lebih reflektif terhadap penggunaan bahasa moral dalam diplomasi. Bahasa etika dan kemanusiaan seharusnya tidak dijadikan alat legitimasi politik, melainkan sarana untuk membangun komunikasi yang setara dan berkeadilan. Pemerintah dan lembaga diplomasi perlu menata kembali strategi komunikasi publik berbasis transparansi, dialog sejajar, dan tanggung jawab sosial agar diplomasi publik tidak kehilangan legitimasi moralnya.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian diplomasi publik di masa mendatang mengintegrasikan analisis wacana kritis dengan studi media digital, guna menelusuri bagaimana algoritma, viralitas, dan kecerdasan buatan turut membentuk narasi diplomasi global. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji wacana diplomasi publik di negara-negara non-Barat untuk mengungkap praktik resistensi terhadap hegemoni wacana global yang selama ini didominasi oleh kekuatan besar. Dengan demikian, pengembangan teori komunikasi kritis akan semakin relevan dalam membaca fenomena diplomasi publik di tengah dinamika kekuasaan informasi abad ke-21.

Sebagai refleksi akhir, diplomasi publik di era *post-truth* harus dipahami bukan sekadar sebagai strategi representasi citra negara, tetapi sebagai medan ideologis tempat kekuasaan bekerja melalui bahasa. Tantangan akademis dan moralnya adalah mengembalikan diplomasi publik pada hakikatnya: sebuah praktik komunikasi yang berbasis dialog, kebenaran, dan tanggung jawab etis terhadap kemanusiaan global.

REFERENSI

- Alberts, J. K., Nakayama, T. K., & Martin, J. N. (2010). *Human communication in society* (2nd ed.). Pearson.
- Altman, T., & Shore, C. (2014). Paradoxes of public diplomacy: Ethnographic perspectives on the European Union delegations in the Antipodes. In N. Snow & P.
- Anjani, A. D., Sari, S., & Benarrivo, R. (2025). Diplomasi Swedia Ke Indonesia Melalui Ekspansi Bisnis Ikea Pada Tahun 2020-2023. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2 (1).
- Aydemir, E. (2017). Use of Hollywood as a soft power tool in foreign policy strategy of the United States of America. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 6(11), 79–83. Retrieved from [https://www.ijhssi.org/papers/v6\(11\)/Version-2/N0611027983.pdf](https://www.ijhssi.org/papers/v6(11)/Version-2/N0611027983.pdf)

- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Pantheon Books.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Snow, N., & Cull, N. J. (Eds.). (2020). *The Routledge handbook of public diplomacy* (2nd ed.). Routledge.
- Izadi, F., & Nelson, R. A. (2020). Ethics and social issues in public diplomacy. In N. Snow & P. M. Taylor (Eds.), *The Routledge Handbook of Public Diplomacy* (2nd ed., pp. 387–398). Routledge.
- Jang, G., & Paik, W. K. (2012). Korean Wave as tool for Korea's new cultural diplomacy. *Advances in Applied Sociology*, 2(3), 196-202.
- Kaukab, M., & Hidayah, A. (2020). Diplomasi digital Indonesia dalam menyikapi disinformasi global. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta*, 12(2), 150–165.
- Kedang, A. Y. (2017). Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror. *Sospol*, 3(2), 21-42.
- Kusuma, S. A., Purnama, C., & Darmawan, W. B. (2020). Diplomasi Publik dan Media: Penggunaan Jaringan Penyiaran Al-Jazeera dalam Krisis Diplomatik Qatar 2017- 2019. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 141-168.
- Melissen, J. (2004). The new public diplomacy: Between theory and practice. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (pp. 3–27). Palgrave Macmillan.
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Mark, S. (2010). A greater role for cultural diplomacy. In N. Snow & P. M. Taylor (Eds.), *The Routledge Handbook of Public Diplomacy* (pp. 274–286). Routledge.
- Nuruddin, M. (2007). Agenda setting dalam isu. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/439784-none-f75b304d.pdf>
- Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.
- Padli, M. S., & Mustofa, M. L. (2021). Kebenaran dalam perspektif filsafat serta aktualisasinya dalam menyaring berita. *Jurnal Filsafat dan Logika*, 6(1), 22–35.
- Purba, H., & Sitorus, F. K. (2023). Truth, post-truth dan dinamikanya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Politik*, 9(2), 101–119.
- Schneider, C. P. (2004). Culture communicates: US diplomacy that works. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (pp. 147– 168). Palgrave Macmillan.
- Simanjuntak, T. R. (2019). efektivitas nation branding “wonderful indonesia” sebagai sebuah strategi dalam hubungan diplomasi pemerintah indonesia tahun 2011-2018. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 8(1), 29-59.
- Sitanggang, N. A. R., Putri, K. Y. S., & Romli, N. A. (2025). Robert N. Entman's framing analysis of the final presidential debate on social welfare in Cnnindonesia.com and Tempo.co (February 4–5, 2024). *Journal of Digital Marketing and Communication*, 5(1), 1–14. <https://www.researchgate.net/publication/388393464>
- Snow, N., & Taylor, P. M. (Eds.). (2024). *The Routledge Handbook of Public Diplomacy* (2nd ed.). Routledge.
- Valerisha, A., & Ahadisuryo, R. F. (2020). IKEA in Indonesia: The synergy of Swedish public diplomacy and nation branding. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 85–97.
- Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 4 (2), 249–283. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>